

**BAHAN SEMINAR
EVALUASI PEMBANGUNAN PETERNAKAN DI JAWA BARAT
Dinas Peternakan Jawa Barat
15 Desember 2005**

**ANALISIS PEMBANGUNAN SEKTOR PETERNAKAN
DI JAWA BARAT**

Oleh:
Rochadi Tawaf dan Achmad Firman

**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2005**

ANALISIS PEMBANGUNAN SEKTOR PETERNAKAN DI JAWA BARAT

Oleh:
Rochadi Tawaf dan Achmad Firman

1. Pendahuluan

Berkaitan era otonomi daerah, setiap wilayah harus mampu mengembangkan berbagai sektor yang potensial untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Demikian juga dengan Propinsi Jawa Barat harus mencari sumber-sumber pendapatan dari berbagai sektor yang menjadi unggulan Jawa Barat terutama dalam peningkatan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto). Berbagai sumber yang potensial tersebut, selanjutnya diupayakan untuk dikembangkan melalui peningkatan investasi baik oleh swasta maupun oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Pembangunan ekonomi regional di Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi Pembangunan Propinsi dituntut untuk melakukan reorientasi pembangunan dengan mengutamakan kekuatan inti (*core business*) perekonomian yang mempunyai prospek dalam skala regional maupun nasional. Salah satu *core business* Jawa Barat adalah bidang agribisnis dengan penetapan kawasan-kawasan yang berbasis agribisnis. Salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan agribisnis di Jawa Barat, yaitu dengan menetapkan fokus komoditas yang akan dikembangkan dengan menetapkan komoditas unggulan serta kawasan sentra produksinya berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki oleh setiap komoditas.

Salah satu subsektor unggulan dalam bidang agribisnis di Jawa Barat adalah subsektor peternakan. Dilihat dari sisi potensi, usaha peternakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat pedesaan di Jawa Barat sebagai usaha sampingan ataupun sebagai usaha pokok keluarganya dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan yang memiliki nilai ekonomi baik bagi pembangunan wilayah maupun bagi petani di Jawa Barat. Selain itu, pengembangan di subsektor peternakan memberikan kontribusi pada penyerapan jumlah tenaga kerja dan sebagai penghasil sumber pangan protein dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, apakah benar subsektor ini merupakan subsektor unggulan di Jawa Barat? Untuk itu, perlu dilakukan analisis yang komprehensif terhadap sub sektor ini dalam beberapa tahun kebelakang.

2. Analisis Permintaan dan Penawaran Produk Peternakan

Sisi Permintaan. Produk utama yang dihasilkan oleh peternakan berupa daging, telur, dan susu. Bila kita lihat pencapaian norma gizi masyarakat Jawa Barat terhadap produk-produk peternakan tersebut (lihat Tabel 1) memperlihatkan tingkat pencapaian yang kurang memuaskan untuk produk daging dan telur karena hanya mencapai 53 % dari target yang ditetapkan. Tetapi angka pencapaian norma gizi pada produk susu memperlihatkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa produk peternakan belum sepenuhnya menjadi bahan makanan sehari-hari dari masyarakat Jawa Barat. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya angka norma gizi tersebut adalah produk peternakan masih menjadi produk istimewa karena harga yang relative mahal. Faktor lainnya adalah rata-rata tingkat pendapat masyarakat masih rendah sehingga alokasi konsumsi masih terfokus pada produk peternakan yang relative terjangkau.

Tabel 1. Pencapaian Norma Gizi dari Komoditas Daging, Telur, dan Susu Masyarakat Jawa Barat

No	Konsumsi	Norma Gizi	Tahun (Kg/Kapita/Thn)				
			2000	2001	2002	2003	2004
1	Daging	10.10	4.34	5.42	6.60	7.04	8.72
2	Telur	4.70	3.03	2.46	2.72	2.80	2.90
3	Susu	6.10	6.61	6.86	7.02	7.31	7.98
	Gram Protein/Hari	6.00	3.76	4.17	4.84	5.12	5.89

Sumber: Dinas Peternakan Jawa Barat, 2005

Sisi Suplai (Penawaran). Jawa Barat dikenal sebagai pusat konsumen daripada sebagai sumber produsen hasil peternakan. Namun demikian, untuk produksi susu Jawa Barat menempati urutan ke dua setelah Jawa Timur sedangkan ayam pedaging menduduki peringkat pertama. Pada Tabel 2,3, dan 4 menggambarkan potensi suplai dari komoditas dan produk peternakan di Jawa Barat. Berdasarkan tersebut terlihat jelas bahwa komoditas yang menjadi andalan dari Jawa Barat adalah Sapi Perah, Sapi Potong, Ayam Ras Pedaging, dan Ayam Ras Petelur. Total produksi daging di Jawa Barat di dominasi oleh produksi ayam ras pedaging. Sedangkan daging yang berasal dari sapi potong baru mampu memberikan kontribusinya terhadap kebutuhan daging sapi sekitar 11,08 %. Bagi komoditi susu di Jawa Barat, diharapkan akan terjadi peningkatan produksi sekitar 1,62 % pertahun. Peningkatan produksi ini, di tingkat peternak terkendala oleh kualitas susu yang dihasilkannya. Apabila dilihat berdasarkan sasaran produksinya, bagi komoditi daging ternyata telah terlampaui pada tahun 2002. Khususnya bagi komoditi daging sapi kenaikannya sangat tidak berarti bila dibandingkan dengan ayam ras pedaging. Sedangkan bagi komoditi susu, masih belum tercapai.

Tabel 2. Jumlah Populasi Ternak (ekor)

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	Sapi Perah	84,756	84,934	91,219	95,513	98,958
2	Sapi Potong	185,686	189,518	205,843	223,818	232,949
3	Kerbau	166,898	153,372	148,778	148,758	149,960
4	Kuda	10,763	11,851	11,963	12,124	14,242
5	Domba	3,036,812	3,087,038	3,162,234	3,288,884	3,529,456
6	Kambing	1,160,462	922,633	878,043	930,066	1,144,102
7	Babi	9,253	12,337	9,702	11,207	8,092
8	Ayam Buras	26,939,832	27,703,049	30,273,560	31,294,784	30,779,120
9	Ayam Ras Pedaging	157,724,310	204,043,170	269,778,372	296,973,072	328,015,536
10	Ayam Ras Petelur	7,349,395	7,403,492	8,588,803	8,446,127	9,720,685
11	Itik	3,481,702	4,055,539	4,293,637	4,952,224	4,880,019

Sumber: Dinas Peternakan Jawa Barat, 2005

Oleh karena itu, orientasi pengembangan sektor peternakan sebaiknya difokuskan pada komoditas-komoditas tersebut. Adapun komoditas yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah domba dan kambing. Hanya saja kedua komoditas ini belum dikembangkan dalam skala industri. Tinggal bagaimana orientasi pihak Dinas Peternakan Jawa Barat untuk memproyeksikan komoditas domba dan kambing menjadi komoditas industri. diperlihatkan bahwa

Tabel 3. Produksi Daging Ternak (kg)

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	Sapi Lokal	52,767,709	63,142,168	42,498,419	44,725,285	53,162,298
2	Sapi Impor	11,403,629	9,639,405	22,700,331	30,172,817	28,549,777
3	Kerbau	4,358,078	4,424,058	3,767,353	2,932,526	4,310,980
4	Kuda	6,396	36,938	-	119,023	87,753
5	Domba	14,429,061	25,802,720	47,823,325	51,777,778	46,139,759
6	Kambing	3,081,847	4,940,287	10,676,628	8,010,256	7,971,172
7	Babi	1,616,519	2,434,306	1,924,515	2,054,185	1,947,941
8	Ayam Buras	24,937,922	25,544,424	28,023,938	28,969,256	28,491,911
9	Ayam Ras Pedaging	126,652,621	163,846,666	216,632,033	238,469,377	263,396,475
10	Ayam Ras Petelur	3,933,983	3,962,940	4,597,413	4,521,041	5,203,286
11	Itik	2,180,729	2,540,146	2,889,277	3,101,776	3,056,551

Sumber: Dinas Peternakan Jawa Barat, 2005

Tabel 4. Produksi Telur dan Susu

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2000	2001	2002	2003	2004
	Produksi telur (kg)	106,838,857	110,456,065	125,584,197	129,205,083	140,131,979
1	Ayam Buras	16,521,768	16,889,837	18,566,302	19,192,590	18,876,342
2	Ayam Ras	67,552,773	68,050,011	78,944,928	77,633,505	89,348,745
3	Itik	22,764,316	25,516,217	28,072,967	32,378,988	31,906,892
	Produksi susu (liter)	179,421,372	179,798,463	193,103,325	202,193,380	209,486,169

Sumber: Dinas Peternakan Jawa Barat, 2005

Berdasarkan kedua Tabel 2,3, dan 4 di atas, *maka Propinsi Jawa Barat mempunyai potensi dan prospek sebagai wilayah konsumsi dan wilayah produksi untuk produk-produk peternakan*. Potensi dan prospek tersebut harus direspon oleh pemerintah Jawa Barat melalui upaya promosi guna mengundang investor untuk menginvestasikan dananya di kedua *peluang* tersebut, yaitu sisi konsumsi dan produksi dari produk-produk peternakan.

3. Peran Subsektor Peternakan Terhadap Perekonomian

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Barat dari tahun 1996 – 2000 memperlihatkan pertumbuhan yang meningkat, walaupun pada tahun 1997 dan 1998 mengalami penurunan kontribusi. Penurunan tersebut disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berdampak pada seluruh sektor perekonomian secara nasional. Subsektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Jawa Barat adalah subsektor tanaman pangan dan peternakan. Oleh karena itu, kedua subsektor pertanian tersebut menjadi subsektor unggulan di dalam pembangunan Jawa Barat (lihat Tabel 5)

Tabel 5. Kontribusi Sektor dan Subsektor Pertanian terhadap PDRB Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Harga Konstan

Uraian	Tahun				
	1996	1997	1998	1999	2000
1. Nilai kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Barat (milyar Rp)	67.522	71.164	58.848	60.671	63.150
2. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Jawa Barat (%)	13.90	12.19	13.62	15.00	14.92
a. Tanaman Pangan	10.00	8.92	10.45	11.34	11.15
b. Perkebunan	0.93	0.78	0.72	0.97	0.93
c. Peternakan	2.04	1.58	1.45	1.59	1.72
d. Kehutanan	0.13	0.13	0.15	0.17	0.16
e. Perikanan	0.79	0.79	0.85	0.94	0.95

Sumber: diolah dari data BPS 1996-2000

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Achmad Firman, dkk (2004) terhadap peran subsektor peternakan dalam perekonomian di Jawa Barat, peranan subsektor peternakan terbagi atas: terhadap penyerapan tenaga kerja, transaksi perdagangan, dan analisis dampak penyebaran. Beberapa variabel tersebut digunakan untuk melihat peranan subsektor peternakan dalam perekonomian Jawa Barat. Data yang digunakan untuk menganalisis peranan subsektor peternakan adalah data *input-output* (I-O) tahun 2000.

Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja di subsektor peternakan menempati urutan ke dua di sektor pertanian dan menempati urutan ke enam dari seluruh sektor perekonomian di Jawa Barat. Bila dilihat dari tingkat output per tenaga kerja, subsektor peternakan memberikan kontribusi sebesar 4,69 Juta Rupiah/Orang (Tabel 4). Artinya bahwa setiap tenaga kerja yang berada di sektor ini memberikan sumbangan sebesar Rp 4,69 juta pada tahun 2000.

Tabel 4. Nilai Output dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor-sektor Perekonomian di Jawa Barat

No	Sektor	Output (Rp Juta)		Tenaga Kerja (org)		Output/ Tenagakerja
		Nilai	%	Jumlah	%	
1	Pertanian	62688857	13.66	4865547	29.69	12.88
	a. Tanaman Pangan	48790496	10.63	1994874	12.17	24.46
	b. Perkebunan	2891586	0.63	437899	2.67	6.60
	c. Peternakan	5249110	1.14	1119076	6.83	4.69
	d. Kehutanan	530555	0.12	632521	3.86	0.84
	e. Perikanan	5227110	1.14	681177	4.16	7.67
2	Pertambangan dan Galian	26041536	5.68	95996	0.59	271.28
3	Industri Pengolahan	218251856	47.57	2835160	17.30	76.98
4	Listrik, Gas dan Air	11655630	2.54	51432	0.31	226.62
5	Bangunan/Konstruksi	20388004	4.44	788171	4.81	25.87
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	57031416	12.43	4091388	24.96	13.94
7	Transportasi dan Komunikasi	20442510	4.46	1282488	7.82	15.94
8	Keuangan, usaha bangunan dan Jasa Perusahaan	11845869	2.58	107413	0.66	110.28
9	Jasa-jasa	30482576	6.64	2272831	13.87	13.41
	Total	458828254	100.00	16390426	100.00	24.54

Sumber: Tabel I-O Jawa Barat Tahun 2000 (diolah)

Transaksi Perdagangan

Gambaran perekonomian Jawa Barat ditinjau dari transaksi perdagangan dapat dilihat pada Tabel 5. Secara keseluruhan transaksi perdagangan di sektor perekonomian Jawa Barat mengalami surplus perdagangan. Artinya total ekspor yang dikeluarkan melebihi impor yang dibutuhkan oleh seluruh sektor perekonomian oleh Propinsi Jawa Barat. Sektor-sektor yang mengalami **surplus** perdagangan adalah sektor jasa-jasa; industri; keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan; perdagangan, hotel dan restoran; transportasi dan komunikasi; serta listrik, gas, dan air. Adapun **sektor pertanian dan seluruh subsektornya mengalami defisit perdagangan, termasuk subsektor peternakan**. Hal ini dapat membuktikan bahwa untuk memproduksi barang atau produk dari sektor pertanian diperlukan berbagai input produksi yang harus didatangkan dari luar wilayah/ negeri (*import content*). Artinya komponen impor masih mendominasi input produksi bagi subsektor peternakan. Di samping itu, produksi dari produk-produk pertanian termasuk subsektor peternakan lebih banyak dikonsumsi di Jawa Barat (dalam negeri) dibandingkan dengan di ekspor. Di lihat dari sisi tersebut, maka Propinsi Jawa Barat termasuk wilayah konsumsi untuk produk-produk pertanian dan peternakan.

Tabel 5. Transaksi Perdagangan (Ekspor-Import) Menurut Sektor

Sektor	Transaksi Perdagangan (Rp. Juta)		
	Ekspor	Impor	Selisih (X-M)
1. Pertanian	360	2497667	-2497307
a. Tanaman Pangan	0	1865399	-1865399
b. Perkebunan	277	58069	-57792
c. Peternakan	83	146950	-146867
d. Kehutanan	0	12448	-12448
e. Perikanan	0	414801	-414801
2. Pertambangan dan Galian	0	0	0
3. Industri Pengolahan	553956	0	553956
4. Listrik, Gas dan Air	301781	0	301781
5. Bangunan/Konstruksi	634780	2011438	-1376658
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	283133	0	283133
7. Transportasi & Komunikasi	322627	0	322627
8. Keuangan, usaha bangunan dan Jasa Perusahaan	116059	0	116059
9. Jasa-jasa	9456229	192569	9263660
Total	11668925	4701674	6967251

Sumber: Tabel I-O Jawa Barat Tahun 2000 (diolah)

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat memberi gambaran bahwa komponen impor yang digunakan untuk proses produksi masih mendominasi input produksi subsektor peternakan. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah mencari alternatif input produksi dari bahan baku local kuantitas dan kualitasnya menyamai dengan produk impor tersebut melalui penelitian dan pengembangan. Upaya penelitian dan pengembangan terhadap sumber daya local dilakukan agar ketergantungan kita terhadap bahan baku impor dapat dikurangi. Atau dapat pula terjadi *sebagai dampak dari kebijakan komoditi unggulan dan ego sektoral yang tinggi, menyebabkan komoditi penunjang tidak mampu memberikan kontribusi terhadap komoditi yang diunggulkan. Oleh karenanya, perlu di reorientasi paradigma komoditi unggulan menjadi "leading sector" pada setiap sektor.*

Analisis Dampak Penyebaran(Dispersion Effect)

Analisis dampak penyebaran digunakan untuk mengetahui sektor mana yang menjadi sektor unggulan (leading sector) dalam pembangunan suatu wilayah. Untuk menghitung dampak penyebaran, ada dua perhitungan yang dilakukan, yaitu menghitung derajat kepekaan (*degree of sensitivity*), yaitu peningkatan output sektor tersebut dapat meningkatkan sektor hilirnya, dan daya penyebaran (*power of dispersion*), yaitu keberadaan sektor tersebut dapat mendorong sektor hulu. Kedua perhitungan di atas menggunakan analisis keterkaitan ke depan dan kebelangan secara tidak langsung. Ada beberapa kriteria di mana suatu sektor dijadikan prioritas atau unggulan dari suatu daerah (Rasmussen dalam Daryanto dan Morison tahun 1992), yaitu:

1. Sektor tersebut masuk ke prioritas I, jika memiliki daya penyebaran dan derajat kepekaan lebih besar dari satu.
2. Sektor tersebut masuk ke prioritas ke II, jika memiliki daya penyebaran lebih dari satu dan derajat kepekaan lebih kecil dari satu.
3. Sektor tersebut masuk ke prioritas ke III, jika memiliki daya penyebaran lebih kecil dari satu dan derajat kepekaan lebih dari satu.
4. Sektor tersebut masuk prioritas ke IV, jika memiliki daya penyebaran dan derajat kepekaan lebih kecil dari satu.

Hasil analisis dampak penyebaran terhadap seluruh sektor perekonomian dapat dilihat pada Tabel 6. Hampir sebagian sektor berada pada nilai derajat kepekaan dan daya penyebaran di bawah nilai satu. Dilihat dari derajat kepekaan, subsektor kehutanan dan subsektor perkebunan mempunyai nilai derajat kepekaan lebih dari satu sedangkan yang lainnya di bawah nilai satu. Sedangkan yang mempunyai daya penyebaran lebih dari satu adalah subsektor perikanan, sektor industri, sektor listrik, gas, dan air, sektor bangunan, dan sektor transportasi dan komunikasi.

Tabel 6. Derajat Kepekaan dan Daya Penyebaran Seluruh Sektor Perekonomian di Jawa Barat

Sektor	Derajat Kepekaan	Daya Penyebaran
Tanaman Pangan	0.7546	0.8827
Perkebunan	1.8847	0.8274
Peternakan	0.8356	0.9176
Kehutanan	2.7653	0.8398
Perikanan	0.6418	1.1046
Pertambangan dan Galian	0.7217	0.9121
Industri Pengolahan	0.8455	1.2805
Listrik, Gas dan Air	0.7597	1.2096
Bangunan/ Konstruksi	0.6007	1.2132
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.7250	0.9567
Transportasi dan Komunikasi	0.8523	1.0706
Keuangan, usaha bangunan dan Jasa Perusahaan	0.9644	0.9300
Jasa-jasa	0.6486	0.8551

Berdasarkan Tabel 6 di atas, maka dapat diklasifikasikan mana sektor yang menjadi prioritas I, II, III, dan IV. Hasil klasifikasi penentuan prioritas dan sektor unggulan perekonomian di Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan tabel tersebut memperlihatkan bahwa *subsektor peternakan merupakan sektor perekonomian yang mendapat prioritas ke IV dalam pembangunan Jawa Barat*. Hal ini menunjukkan bahwa

subsektor peternakan belum menjadi sektor unggulan di Jawa Barat. Bila kita melihat persaingan antar wilayah, khususnya Jawa Tengah, sub sektor peternakan menempati prioritas ke II dengan nilai derajat kepekaan dan daya penyebaran masing-masing sebesar 0,8231 dan 1,1024 (Beni Firmansyah, 2004). **Oleh karena itu, agar subsektor peternakan menjadi subsektor unggulan, maka pengembangan produksi dan memperkecil input produksi dari bahan baku impor harus dilakukan agar sektor ini mampu menjadi sektor unggulan.**

Tabel 7. Kriteria Penentuan Prioritas dan Sektor Unggulan Perekonomian di Jawa Barat

Prioritas	Nilai Derajat Kepekaan	Nilai Daya Penyebaran	Sektor-sektor
I	> 1	> 1	Tidak ada
II	< 1	> 1	Perikanan; industri pengolahan; listrik, gas, dan air; bangunan/konstruksi; dan transportasi dan komunikasi
III	> 1	< 1	Perkebunan dan Kehutanan
IV	< 1	< 1	Tanaman pangan; Peternakan ; pertambangan dan galian; perdagangan, hotel, dan restoran; keuangan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa

4. Langkah-langkah dan Kebijakan dalam Subsektor Peternakan

Pembangunan peternakan yang berkelanjutan memerlukan kebijakan yang menyeimbangkan peranan keseluruhan subsistem agribisnis peternakan yaitu *pra produksi*, *produksi atau budi daya*, dan *pasca produksi* yang meliputi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil. Ketiganya harus mampu berkembang secara terpadu, sehingga potensi sumber daya alam dan pertumbuhan pada salah satu subsistem pada gilirannya harus memacu pertumbuhan pada subsistem lainnya. Pemerintah berkepentingan dengan kesinambungan agribisnis peternakan tersebut, sehingga berperan dalam mendorong bekerjanya pasar yang efisien melalui pelayanan informasi, infrastruktur untuk memperlancar distribusi barang, stabilitas harga dan produksi, dan pengembangan pemanfaatan plasma nutfah.

Bagi kalangan pelaku usaha, baik peternak atau pemilik modal kesediaan untuk memilih peternakan sebagai suatu bentuk kegiatan investasi didasarkan kepada perhitungan jangka panjang maupun jangka pendek. Pertimbangan jangka pendek didasarkan kepada layak tidaknya dari segi imbalan arus pendanaan (*cash flow*), insentif bagi peternak berupa pendapatan yang wajar atas korbanan pencurahan kerja (*cost opportunity of farm labor*), serta tingkat keuntungan usaha jangka pendek yang didasarkan kepada selisih antara total nilai penjualan dan biaya operasional. Sedangkan dalam jangka panjang adalah berupa kemampuan usaha tersebut mengembalikan investasi yang ditanamkan (*financial rate of return*). Mengingat berlakunya penilaian *time prefency of money*, makin cepat suatu jenis usaha mampu mengembalikan investasi (*pay back periode*) makin berpeluang untuk menjadi pilihan investasi.

Guna peningkatan nilai tambah pada masing-masing sub sistem, maka wilayah Jawa Barat yang secara geografis terbagi kedalam tiga wilayah yaitu Utara, Tengah dan Selatan. Di wilayah Utara dan Tengah, sesuai dengan perkembangan saat ini, tampaknya harus dikukuhkan sebagai daerah subsistem pasca produksi. Sedangkan Selatan, merupakan wilayah sub sistem produksi. Peningkatan pendapatan masyarakat industri di wilayah Tengah dan Utara, telah mendorong sub sistem pasca produksi tumbuh subur. Kondisi ini, harus mampu menarik subsistem produksi dan sarana produksi di wilayah selatan. Sehingga pertumbuhan Jawa Barat dapat berkembang secara bersama.

Penetapan arah pembangunan ini harus menganut pola pikir saling ketergantungan antar sektor. Sehingga konsekuensinya penetapan komoditi unggulan harus pula bermakna kepada

konsep “leading sector”. Dalam upaya penetapan komoditi unggulan harus didasarkan hasil analisis “Input Output”, artinya bukan didasarkan kepada “rasa kebanggaan wilayah” atas komoditi yang ada.

Kelembagaan Pembina

Pendekatan kelembagaan bagi keberhasilan dalam menjalankan pembangunan agribisnis peternakan sapi di Jawa Barat terkendala oleh pelaksanaan operasionalnya yang berbeda dengan pemerintah pusat. Di Jakarta, Departemen Pertanian telah membagi Direktorat Jenderal berdasarkan Pola Pendekatan Agribisnis. Misalnya, Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dsb. Sedangkan di tingkat Propinsi Jawa Barat, kelembagaan pelayanan kepada peternak masih melakukan pendekatan *farming system*, antara lain di beberapa Kota dan kabupaten. Misalnya, Dinas Pertanian (peternakan masuk didalamnya) dan Dinas Peternakan dan Perikanan. Kenyataan ini mencirikan betapa akan terjadi benturan dalam pelaksanaan operasional dari kebijakan pembangunan agribisnis. Kendala kelembagaan ini, harus diminimalisir dengan menyusun sistem dan prosedur hubungan profesi yang jelas dalam kerangka pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat.

Pendekatan Teknologi Adaptif

Dalam rangka pengembangan agribisnis peternakan, khususnya pada subsistem budidaya, memerlukan adanya teknologi baru. Menurut A.T. Mosher di dalam *Getting Agriculture Movement*, adanya teknologi yang berubah merupakan salah satu faktor esensial didalam pembangunan dan modernisasi pertanian. Faktor esensial lainnya adalah adanya pasar bagi produksi hasil pertanian, tersedianya input secara lokal, insentif produksi bagi petani, dan tersedianya sarana angkutan. Sudah barang tentu adanya teknologi akan berdampak pada munculnya produk baru yang potensial menggeser produk lama yang tidak produktif, atau munculnya input baru atau perbaikan (*improvement*) input lokal, yang pada akhirnya berdampak pada proses produksi. Di bidang peternakan dapat dilihat pada introduksi pakan konsentrat yang kaya nutrisi untuk ternak ruminansia akan mensubstitusi sebagian konsumsi hijauan, meluasnya penggunaan teknologi IB menggeser peran sapi pejantan.

Teknologi dengan input baru selain berdampak pada hubungan input-output (fungsi produksi), juga berdampak terhadap biaya per unit output, penerimaan usaha dan tingkat keuntungan. Apakah teknologi ini memberikan dampak positif, atau sebaliknya, sangat bergantung kepada seberapa besar input tersebut mampu menurunkan biaya per unit output. Adanya input baru yang bersifat *cost reducing technology*, bagi pengembangan usaha peternakan dibutuhkan terutama dalam rangka memberi insentif bagi peternak dalam mengadopsi teknologi sekaligus mengembangkan usahanya, meningkatkan daya saing produk serta memperluas pemasaran.

Keberhasilan pembangunan pertanian di sejumlah negara maju karena didorong oleh tingginya percepatan inovasi teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian (yaitu kemampuan per unit input untuk menghasilkan farm output). Di Amerika Serikat selama periode empat puluh tahun (1935-1975) produktivitas pertanian meningkat dua kali lipat. Menurut Doll dan Orazem (1984), ada dua faktor utama yang menyebabkan kenaikan tersebut, yaitu (1) adanya investasi publik maupun swasta di bidang riset pertanian, dan (2) kesediaan para petani mengadopsi teknik-teknik baru, terutama didalam pengembangan teknik-teknik produksi. Disamping itu kalangan industri seperti pabrik peralatan pertanian, pabrik pupuk dan makanan ternak, dan obat-obatan, memberikan kontribusi dalam menyediakan input pertanian. Pengembangan teknologi menyentuh berbagai aspek teknis produksi mulai dari perbaikan mutu bibit ternak, input atau bahan pakan baru, *feed additives*, peralatan pemeliharaan, dan yang lebih penting lagi adalah adanya dukungan peningkatan *skill* para peternak dalam mengelola usahanya.

Lemahnya pengembangan teknologi peternakan ditandai dengan lemahnya riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian yang tidak menyentuh kondisi di lapangan. Banyaknya riset yang tidak aplikatif, hanya ditujukan bagi kepentingan kenaikan pangkat, merupakan fenomena yang perlu dibenahi di tingkat lembaga riset. Pusat-pusat studi lapangan yang dimiliki petani masih langka untuk bidang peternakan tidak seperti pada bidang lainnya. Perlu dilakukan pula pengujian terhadap berbagai hasil kajian yang ada selama ini, sehingga penelitian tersebut memiliki akuntabilitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Artinya, penelitian yang dilakukan akan memberikan kontribusi nyata pada pembangunan.

Re-evaluasi Kebijakan Dasar Pembangunan Peternakan

Sejak pemerintah Indonesia meratifikasi WTO (World Trade Organization) yang menjadi organisasi pelaksana GATT (General Agreement Tariff and Trade) pada bulan Januari tahun 1995, dan dengan terjadinya perubahan paradigma pembangunan pertanian/peternakan nasional melalui pendekatan sistem agribisnis dan muatan lokal, maka masyarakat peternakan Indonesia melalui FORUM Masterindo (Forum Komunikasi dan Konsultasi Masyarakat Peternakan Indonesia) telah mengajukan kepada Pemerintah mengenai penyempurnaan UU No. 6/1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada tanggal 27 Juni 1995. Pendekatan yang telah dilakukan untuk mengatasi kelemahan dari UU No. 6/1967, telah dilakukan dengan diterbitkannya beberapa SK Menteri Pertanian. Akan tetapi, dengan keluarnya Tap. MPR No. 3/2000 tata urutan perundang-undangan dimana Perda (Peraturan Daerah) memiliki kekuatan hukum lebih baik daripada SK Menteri. Jadi menurut beberapa pemahaman, SK Menteri dapat diabaikan (Forum Masterindo, 2002). Kondisi ini merupakan persoalan yang harus diselesaikan lebih awal. Misalnya, Pemerintah Daerah segera melakukan inventarisasi kebutuhan akan aturan untuk membuat Perda baru, guna memenuhi pengaturan pembangunan peternakan di Daerah Jawa Barat, sebelum melakukan tindakan operasional yang lainnya. Disadari pula bahwa pembangunan peternakan yang bertumpu di kota/kabupaten masih dirasakan kurang siap sumberdaya manusia dan kebijakan daerah, sehingga diawatirkan akan terjadinya tumpang tindih kebijakan.

Otonomi Daerah

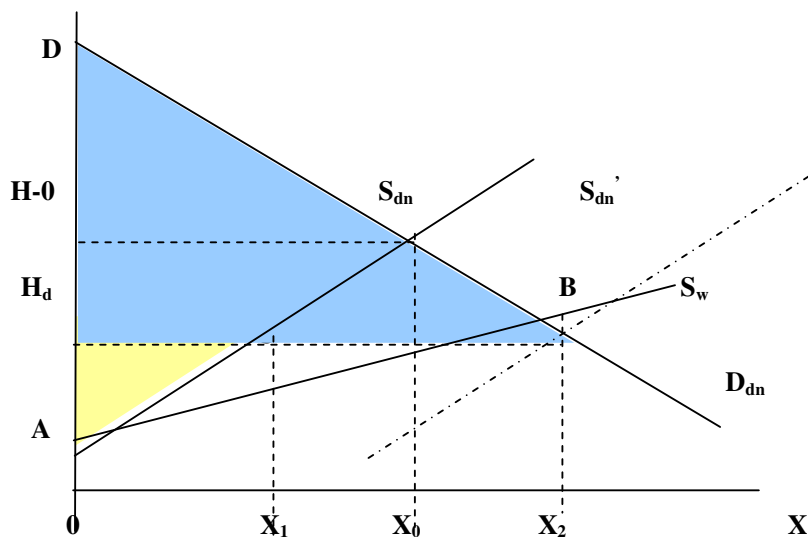
Pelaksanaan otonomi di daerah, telah dan sedang dioperasionalkan. Kadangkala kebijakan yang dilahirkan di daerah menjadi bumerang, bagi pembangunan peternakan, contoh kasus beberapa waktu yang lalu di Propinsi Lampung, akibat penetapan Retribusi ternak yang tumpang tindih antara Dinas Peternakan dan Pendapatan Daerah, berakibat banyaknya pengusaha *feedloter* yang beralih usahanya ke propinsi lain. Daerah Kabupaten/kota sebagai ujung tombak pembangunan, nyatanya tidak dapat berbuat banyak, karena tidak memiliki fasilitas operasional dalam melayani masyarakat. Seperti halnya, di Kabupaten Bandung, Dinas Peternakan tidak memiliki UPTD atau Balai Pelatihan/Laboratorium Lapangan, padahal potensi sapi perahnya memberikan kontribusi sekitar 30 % terhadap produksi susu nasional. Kenyataan ini menyulitkan Pemda Kabupaten Bandung (Dinas Peternakan dan Perikanan) untuk melakukan pembinaan bagi peternak, karena terkendala oleh keterbatasan sarana yang dimilikinya. Selain itu, sumber daya manusia di tingkat Pemerintah Kabupaten/kota sebenarnya masih belum siap untuk menghadapi era otonomi daerah dan pasar bebas. Karena, tuntutan yang harus dipenuhi dalam era tersebut, adalah *sikap kewirausahaan dan proaktif* untuk dapat melakukan pembinaan kepada peternak sehingga dampaknya akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dampak Pasar Lokal Menjadi Global dan Peluang

Pada dasarnya suatu komoditas diimpor atau diekspor tergantung pada harga pasar domestik relatif terhadap harga pasar dunia, misalnya pada harga daging sapi. Dengan

demikian, selama harga daging sapi di dalam negeri secara relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga daging sapi di pasar dunia, maka jumlah impor daging sapi akan terus bertambah, artinya pasar daging sapi potong domestik sudah terintegrasi ke dalam struktur pasar global. Bagaimana dampak lebih jauh dari kebijakan kebijakan ini, dapat diikuti dari kerangka penjelasan menggunakan model Hirshleifer (1985) seperti pada ilustrasi 1.

Masuknya impor daging disebabkan oleh tingginya harga daging di dalam negeri. Dalam pasar bebas, karena tataniaganya tidak diatur oleh pemerintah, maka harga daging di dalam negeri akan sama dengan harga daging di pasar dunia (H_d). Pada tingkat harga tersebut produsen dalam negeri (peternak) hanya mampu memenuhi kebutuhan daging sebanyak X_1 , sedangkan permintaan sebanyak X_2 . Kekurangan daging sapi sebanyak ini akan diisi oleh daging impor sebanyak $X_2 - X_1$. Karena suplai daging di pasar internasional lebih elastis (S_w) daripada suplai dalam negeri (S_{dn}) maka dengan adanya impor, konsumen akan memperoleh *surplus* sebesar (H_dCBD). Ditinjau dari sisi upaya peningkatan gizi masyarakat hal ini sangat menguntungkan, karena konsumen menikmati daging sapi dengan harga murah.



Ilustrasi 1. Pengaruh Impor Sapi dan Daging terhadap Produsen Dan Konsumen di Dalam Negeri

Konsekuensi dari kebijakan penyatuan pasar lokal dengan pasar internasional (pasar bebas) adalah besarnya kebutuhan devisa untuk membeli daging. Disamping itu kebijakan ini secara teoritis tidak memberi rangsangan bagi peternak di dalam negeri, karena hanya menikmati surplus ekonomi yang lebih kecil (ACH_d). Bila tidak ada perlindungan dari berbagai kebijakan pemerintah dikhawatirkan sebagian besar peternak sapi potong rakyat akan menghentikan usahanya.

Secara teoritis masalahnya adalah bagaimana menggeser kurva S_{dn} ke sebelah kanan menjadi S_{dn}' . Berbagai upaya untuk menuju kearah ini dapat dikemukakan sebagai berikut : Berbagai penelitian telah melaporkan adanya pengaruh positif dari impul pasar terhadap perbaikan produktivitas peternakan sapi potong rakyat. Jarmani dan Sianturi (1995) melaporkan bahwa potensi wilayah menghasilkan pakan, keberhasilan program IB (inseminasi buatan), tersedianya wilayah pemasaran, memberikan peluang yang baik bagi pengembangan peternakan sapi potong. Melalui pembinaan kelompok secara teratur, introduksi teknologi, serta perbaikan tatalaksana dapat mempersingkat pemeliharaan dan mempercepat waktu jual, serta meningkatkan pendapatan peternak (Wahyono dan Soepeno, 1995). Keberhasilan pengembangan sapi potong

juga terjadi dalam sistem kereman/penggemukan (Santoso, dkk., 1995; Sarwono, 1995; Sugandi, dkk., 1995 dan Sumanto, dkk.,1995).

Berbagai kajian tersebut pada prinsipnya melaporkan keberhasilan peningkatan produktivitas usahaternak sapi potong rakyat melalui perbaikan teknologi reproduksi, perbaikan penyediaan pakan, serta perbaikan kelembagaan. Implementasinya dalam proses produksi adalah adanya pergeseran fungsi produksi ke atas, serta menggeser kurva biaya marjinal ke kanan. Karena kurva penawaran konsumen merupakan kurva biaya marjinal, maka bila perbaikan produktifitas terus terjadi, kurva penawaran sapi potong akan menggeser ke kanan, yang artinya suplai akan bertambah diikuti dengan harga yang lebih murah.

Free and Fair Trade

Sebagai negara yang sudah menanda tangani perjanjian *GATT (General Agreement on Trade and Tariffs)*, secara konsekwen Indonesia tidak dibenarkan lagi melakukan proteksi berlebihan terhadap industrinya. Indonesia hanya akan mengenal satu kebijaksanaan proteksi yakni sistem tarif dalam perdagangan internasional. Subsidi ekspor dan subsidi dalam bentuk apapun tidak dibenarkan lagi. Tujuan dari WTO di bidang pertanian khususnya peternakan adalah membuka pasar bagi barang-barang ekspor dan impor. Menurut Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, (2004), ada tiga prinsip akses pasar untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu :

1. *Most Favoured Nation*, ini merupakan prinsip utama negara-negara anggota WTO tidak boleh mendiskriminasikan negara-negara mitra dagangnya secara sepihak dan seenaknya. Keringanan tarif masuk yang dikenakan terhadap produk impor dari suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari negara-negara anggota lainnya yang menjadi mitra dagangnya.
2. *National Treatment*, negara-negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama terhadap barang-barang lokal, minimal setelah barang impor memasuki pasar domestik.
3. *Transparency*, negara anggota diwajibkan untuk bersikap terbuka terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan pelaku usaha melakukan kegiatan perdagangan.

Untuk mengimbangi kenaikan impor ini, maka pembinaan terhadap peternak perlu ditingkatkan, khususnya pada kemampuannya bertahan akibat perubahan lingkungan. Arahnya diubah menuju kegiatan profesionalisme dalam pemeliharaan agar dicapai tingkat efisiensi yang mampu bersaing di pasaran dunia. Profesionalisme dapat ditingkatkan melalui peningkatan pemanfaatan berbagai hasil penelitian baik di Lembaga Penelitian maupun di Perguruan Tinggi. Oleh karena itu hasil penelitian tersebut hendaknya disebarakan merata kepada para peternak, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa sederhana dan mudah diserap.

5. Evaluasi Program Pembangunan

Beberapa hal yang dapat dievaluasi dari laporan kinerja peternakan di Jawa Barat, yaitu:

1. Evaluasi terhadap **Rencana Strategi Dinas Peternakan Jawa Barat Tahun 2001-2005**, yaitu
 - a. Tidak terdapatnya ukuran-ukuran pencapain target yang dibreakdown ke dalam pertahun sehingga pengukuran kinerja dalam pencapaian target akan sulit diukur, misalnya sasarannya meningkatkan investasi sebesar Rp 1.289 milyar tahun 2001 namun implementasi kegiatannya belum mengarah pada investasi misalnya pengurangan pajak, retribusi, atau kemudahan birokrasi dalam berinvestasi sehingga para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat
 - b. Program dan kegiatan

- c. Tidak terdapatnya klausul yang menyebutkan, apabila program dan kegiatan tidak mencapai sasaran dalam tahun ke-A, maka program harus dilanjutkan untuk tahun berikutnya.
 - d. Belum diprogramkan apabila terdapat kejadian luar biasa di dalam program untuk mengantisipasi segala situasi yang ada
2. Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan satuan kerja
 - a. Tidak adanya pembahasan dalam laporan tahunan tentang pencapaian kondisi makro dari subsektor peternakan terhadap perekonomian Jawa Barat dilihat dari kontribusi terhadap PDRB, kontribusi tiap komoditas terhadap subsektor peternakan, penyerapan tenaga kerja, transaksi perdagangan, dan dampak keberadaan subsektor ini terhadap sektor-sektor perekonomian lainnya. Padahal dalam rencana strategis Dinas Peternakan Jawa Barat telah ditentukan sarannya.
 - b. Penyusunan rencana program dan kegiatan untuk anggaran tahun 2005 (Rincian Alokasi Dask Prop. Jabar, 2005, hal 0) tidak sesuai dengan rencana strategis Dinas Peternakan Jabar (lihat Lampiran 5. Perencanaan Strategis – 2 Dinas Peternakan Tahun 2005). Didalam rencana strategis terdapat 7 program dan 28 kegiatan sedangkan yang disusun hanya 3 program dan 15 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa antara perencanaan strategis dan implementasi program terjadi ketidaksinkronan. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan strategis yang disusun hanya sebagai tulisan saja belum dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan program pertahunnya.
 - c. Dikarenakan tidak adanya ukuran dan target yang jelas di Rencana Strategis dalam setiap tahunnya, maka laporan pencapaian kinerja hanya berupa pencapaian fisik dan keuangan saja.

Saran-saran

1. Sebaiknya penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait dengan peternakan, seperti Perusahaan Swasta, Perguruan Tinggi, LSM, Koperasi, Pemda Kabupaten/Kota, Media masa, dan sebagainya
2. Sebaiknya rencana strategis yang akan disusun harus jelas sasaran, target, dan ukuran-ukuran pencapaian kerjanya yang diukur dalam setiap tahun sehingga akan mempermudah dalam mengevaluasi program
3. Sebaiknya sekat-sekat ego sektoral harus mulai dihapuskan melalui penyusunan program yang secara terpadu antar seluruh dinas yang ada di Jawa Barat
4. Khusus untuk kegiatan internal Dinas Peternakan Jabar, sebaiknya membangun data base yang dapat diakses oleh seluruh unit-unit yang ada di Dinas Jabar dan Dinas atau Sub dinas Peternakan Daerah sehingga data base ini akan terus di update dan merupakan sumber informasi yang valid.
5. Data-data hasil kegiatan per unit di Dinas Peternakan sebaiknya juga dimasukkan ke dalam data base sehingga dapat memperkaya informasi dan penyusunan program berikutnya.

Daftar Pustaka

- Achmad Firman, Sondi Kuswaryan, dan Sri Rahayu. 2004. Dampak Investasi Subsektor Peternakan Terhadap Perekonomian Propinsi Jawa Barat (Analisis Input - Output). Universitas Padjadjaran. Bandung
- Beni Firmansyah. 2004. Dampak Subsektor Peternakan Terhadap Struktur Perekonomian Propinsi Jawa Tengah. Skripsi Sarjana S1. Fakultas Peternakan. Universitas Padjadjaran. Sumedang
- Bungaran Saragih (1998) Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, kumpulan Pemikiran. Yayasan Mulia Persada Indonesia dan PT Surveyor Indonesia dengan Pusat Studi Pembangunan. Lembaga Penelitian IPB Bogor.

- Daryanto, A and J.B. Morison. 1992. Structural Interdependence in The Indonesia Economy with Emphasis on The Agriculture Sector 19971-1985: An Input Output Analysis. *Mimbar Sosek Pertanian*, 6 (6):74-79. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Dirjen Binprod Peternakan, (2004). Pokok-pokok Pemikiran tentang Pembangunan Peternakan 2005-2009. Disiapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, sebagai bahan diskusi perumusan Renstra, Renop, Penyusunan Peternakan Jangka Menengah Jakarta Juli 2004
- Dinas Peternakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (2001) Sasaran Program Pembangunan Peternakan 2001 – 2005.
- Direktorat Jenderal Produksi Peternakan (1999) Buku Statistik Peternakan.
- Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat (2003) Laporan Tahunan. Pemerintah Propinsi Jawa Barat Bandung.
- Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat (2003) Statistik. Pemerintah Propinsi Jawa Barat Bandung.
- Gumbira-Sa'id dan Harizt Intan (2001) Manajemen Agribisnis, PT Ghalia Indonesia dengan MMA-IPB Bogor.
- Hasan Hadiana dan Sondi Kuswaryan. 2001. Pengembangan Agribisnis Peternakan di Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis dan Garut. Fakultas Peternakan Unpad.
- Heady. E.O. dan J Dillon. 1969. *Agricultural Production Function*. Ames Iowa State University Press.
- Hirshleifer Jack (1985) *Teori Haega dan Penerapannya*, Terjemahan oleh Kusnedi. Penerbit Erlangga Jakarta
- Kikuchi, M. (1984). *Factor Share in Agricultural Production : Definition, Estimation, and Application in Basic Procedures for Agro Economic Research* IRRI Manila. Philippines.
- Monke, Eric A. and Scott R. Pearson. (1989). *The Policy Analysis Matrix for Agriculture Development*. Cornell University Press. Ithaca and London.
- PSP IPB - APFINDO (2003) Dampak Impor Sapi bakalan, Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB.
- Rochadi Tawaf, dan Sri Rayahu. (2003) Analisis Kelayakan Usaha Kemitraan Sapi potong, Sapi perah dan Ayam Ras. Kerjasama Dinas Peternakan Jawa Barat dan Fapet Unpad
- Rochadi Tawaf (2004). Dampak Kebijakan otonomi Daerah Dalam Menjamin Keamanan dan Ketahanan Pangan Nasional. Seminar seri keamanan pangan Food Safety Seminar, ISPI dan PDHI, Jakarta 25 Agustus 2004.
- Rochadi Tawaf (2004). Perspektif industri *feedlot* Di indonesia. Kajian Dewan pakar Apfindo, Oktober 2004.
- Rochadi Tawaf dan Sondi Kuswaryan (2004). Tata Niaga Peternakan Jawa Barat, Kerjasama Fakultas Peternakan Unpad dengan Dinas Peternakan Jawa Barat.
- Rochadi Tawaf (2005). Pengaruh Impor Jeroan Dan Daging Sapi (Illegal) Terhadap Perkembangan Usaha Dan Industri Sapi Potong Di Dalam Negeri. Makalah Puslitbang Perternakan Bogor.
- Saragih, B. dan T. Sipayung (2000). Membangun Perekonomian Daerah Yang Berkeadilan dan Berdaya Saing melalui Pembangunan Sistem Agribisnis. Seminar Evaluasi dan Prospek Serta Kebijakan Pembangunan Pertanian Berbudaya Industri di Daerah Lampung. Unila Bandar Lampung